

Judul : DPR beri sinyal setuju kenaikan
Tanggal : Rabu, 16 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

DANA PARPOL

DPR Beri Sinyal Setuju Kenaikan

JAKARTA, KOMPAS — Badan Anggaran DPR memberikan sinyal masih ada ruang dalam postur APBN terkait dengan usulan penambahan dana partai politik dari pemerintah menjadi Rp 3.000 per suara. Namun, kebijakan anggaran negara belum diputuskan karena masih dibahas DPR bersama Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Jazilul Fawaid saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Selasa (15/7/2025), mengatakan, usulan dari Kementerian Dalam Negeri terkait penambahan dana partai politik dari Rp 1.000 per suara menjadi Rp 3.000 per suara patut diapresiasi.

Kenaikan itu dinilai tidak akan membebani anggaran negara nantinya. "Kalau DPR mau, pemerintah mau, saya pikir alokasi dananya bisa diatur," ujar Jazilul.

Saat ini, aturan terkait dana parpol diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Dalam Pasal 1 disebutkan, bantuan politik atau biasa disebut dana parpol adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBN atau APBD yang diberikan secara proporsional kepada parpol yang mendapatkan kursi di DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Penghitungan besaran dana bantuan politik yang diterima parpol berdasarkan jumlah perolehan suara. PP tersebut mengatur besaran uang yang diterima parpol per suara sah. Untuk tingkat DPR, parpol akan mendapatkan bantuan sebesar Rp 1.000 per suara sah.

Sebelumnya, dalam rapat anggaran bersama Komisi II DPR, Selasa (8/7), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan bantuan keuangan untuk parpol dinaikkan tiga kali lipat, yakni dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000 per suara. Tito juga menuturkan agar DPR menyetujui dana parpol bisa langsung ditransfer ke rekening partai. "Keuangan tanpa melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)," katanya.

Menurut Tito, Kemendagri akan melakukan verifikasi sehingga anggaran bantuan keuangan parpol tidak dimasukkan dalam alokasi anggaran Kemendagri. Selain untuk bantuan keuangan parpol, Tito mengatakan anggaran pun perlu ditambah untuk modal seleksi anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu.

Jazilul yang juga Wakil Ketua Umum PKB menambahkan, secara prinsip partainya mendukung peningkatan dana bantuan negara untuk parpol. PKB tidak menetapkan angka tertentu, tetapi menekankan dana yang disalurkan harus dapat digunakan secara efektif oleh partai tanpa menyalahi aturan.

Pembenahan sistem

Ia juga mendorong agar wacana kenaikan bantuan keuangan parpol dibarengi pembenahan sistem, pengawasan, dan peraturan teknis yang memungkinkan penggunaan anggaran secara tepat guna dan transparan. Ia melihat masih ada risiko penyalahgunaan anggaran tersebut jika dinaikkan.

Wakil Ketua Komisi II DPR Aria Bima mengatakan, usulan Kemendagri itu belum disetujui oleh Komisi II DPR. Pihaknya masih mengkaji usulan dari pemerintah dan menyesuaikan dengan pagu indikatif dari Kemendagri. Paparan Kemendagri menyebutkan, untuk menambah dana partai politik itu, diperlukan tambahan anggaran sebesar Rp 414 miliar.

Namun, secara pribadi, ia mendukung inisiatif pemerintah menaikkan dana untuk parpol tersebut. "Soal kenaikan itu memang saya lihat tidak terlalu membuat beban dari pengeluaran negara," ujar Aria Bima, yang juga politikus dari PDI-P tersebut.

Menurut Aria Bima, berapa pun angka penambahan, dana itu sangat penting untuk penguatan kapasitas kader dan kelembagaan yang diyakini dapat meminimalkan eksekusi negatif yang selama ini kerap terjadi. Penggunaan anggaran itu pun harus dilakukan secara transparan.

Penambahan bantuan keuangan dari negara kepada parpol, menurut Aria Bima, juga akan meningkatkan kapasitas kader sekaligus memperkuat kelembagaan partai. Kualitas demokrasi akan semakin berjalan maju kalau ditopang partai politik yang berkualitas, salah satunya dimulai dengan unsur pembiayaan parpol. "Dengan demikian, partainya berkualitas, kadernya juga berkualitas," kata Aria Bima. (DVT)